



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)  
Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id) , Website : [www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)

Gunungsitoli, 22 April 2024

Nomor : W2.U12/ /HK/IV/2024

Perihal : Undangan

Kepada Yth;

Bapak/Ibu Panmud Hukum, Staff Kepaniteraan Muda Hukum dan TIM SKM dan SPAK  
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang bapak/ Ibu untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 23 April 2024  
Pukul : 09.00 Wib  
Tempat : Ruang Kepaniteraan Muda Hukum  
Agenda : Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim SKM dan SPAK

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.  
NIP. 198309142009041002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343)  
Email : [info@gunungsitoli.go.id](mailto:info@gunungsitoli.go.id) , Website : [www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)

**DAFTAR HADIR**

**Monitoring Dan Evaluasi Skm Dan Spak  
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B  
Hari Selasa Tanggal 23 April 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDATANGAN	KET
1.	Fadel Pardamean Bate'e, S.H.	Ketua Tim		
2.	Trisman Zandroto	Sekretaris Tim		
3.	Affection E.M. Gulo, S.Kom	Anggota		
4.	Deyendi Molore Manalu, S.Sos	Anggota		
5.	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md.A.B.	Anggota		

Ketua Tim SKM dan SPAK

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.  
NIP. 198309142009041002

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE TRIWULAN I  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rapat dibuka oleh Bapak Fadel Perdamean Bate'e, S.H.,M.H sebagai Ketua Tim Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan bahwa tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi SKM secara rutin adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kemudian acara rapat dilanjutkan oleh Bapak Trisman Zandroto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan, berdasarkan laporan hasil survei persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang pelaksanaan surveynya dilakukan dalam periode triwulan I yaitu pada bulan Januari-Maret 2024, didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Kategori
1	Manipulasi Peraturan/Prosedur	4,000	Sangat Baik
2	Penyalagunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	3,891	Sangat Baik
4	Transparansi Biaya	3,935	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik
6	Hadiah	4,000	Sangat Baik
7	Transparansi Pembayaran	4,000	Sangat Baik
8	Percaloan	3,957	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik

Dari 3 (tiga) nilai SPAK terendah tersebut diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu:

1. Indikator Terendah I: Menjual Pengaruh

- Penyebab/Kendala: Masih ada pengguna layanan yang menggunakan kuasa atau jasa orang ketiga untuk mengurus keperluannya dipersidangan atau ada pihak luar yang mengaku kerja di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
- Solusi: Memberikan informasi papan identitas seluruh Hakim dan ASN Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli di ruang PTSP agar tidak ada pihak yang menyalagunakan identitas
- Rencana Tindak Lanjut: Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunungsitoli di ruang PTSP
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 30 April 2024

2. Indikator Terendah II: Transparansi Biaya

- Penyebab/Kendala: Kurangnya informasi tentang tarif/biaya perkara atau biaya PNBPN produk layanan lainnya

- Solusi: Mencantumkan biaya/tarif PNBP produk layanan di Website dan tempat yang mudah dilihat pengunjung
- Rencana Tindak Lanjut: Mencantumkan biaya/tarif PNBP produk layanan di Website dan tempat yang mudah dilihat pengunjung
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 30 April 2024.

3. Indikator Terendah III: Percaloan

- Penyebab/Kendala: Masyarakat masih mempercayakan calo untuk mengurus urusannya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga biaya tarif yang dibayarkan lebih mahal.
- Solusi: Petugas PTSP tidak memberikan celah kepada calo
- Rencana Tindak Lanjut: Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja
- Pelaksanaan; Dilaksanakan tanggal 30 April 2024

Kemudian Bapak Fadel Perdamean Bate'e, S.H.,M.H. sebagai Ketua Tim Survei menyampaikan perlunya kerjasama seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Triwulan I akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihimbau kepada para petugas survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisisioner yang diberikan. Kemudian acara monitoring dan evaluasi ditutup.

Gunungsitoli, 23 April 2024

↳Ketua Tim SKM dan SPAK



Fadel Perdamean Bate'e, S.H.,M.H.  
NIP. 198309142009041002

## LAMPIRAN

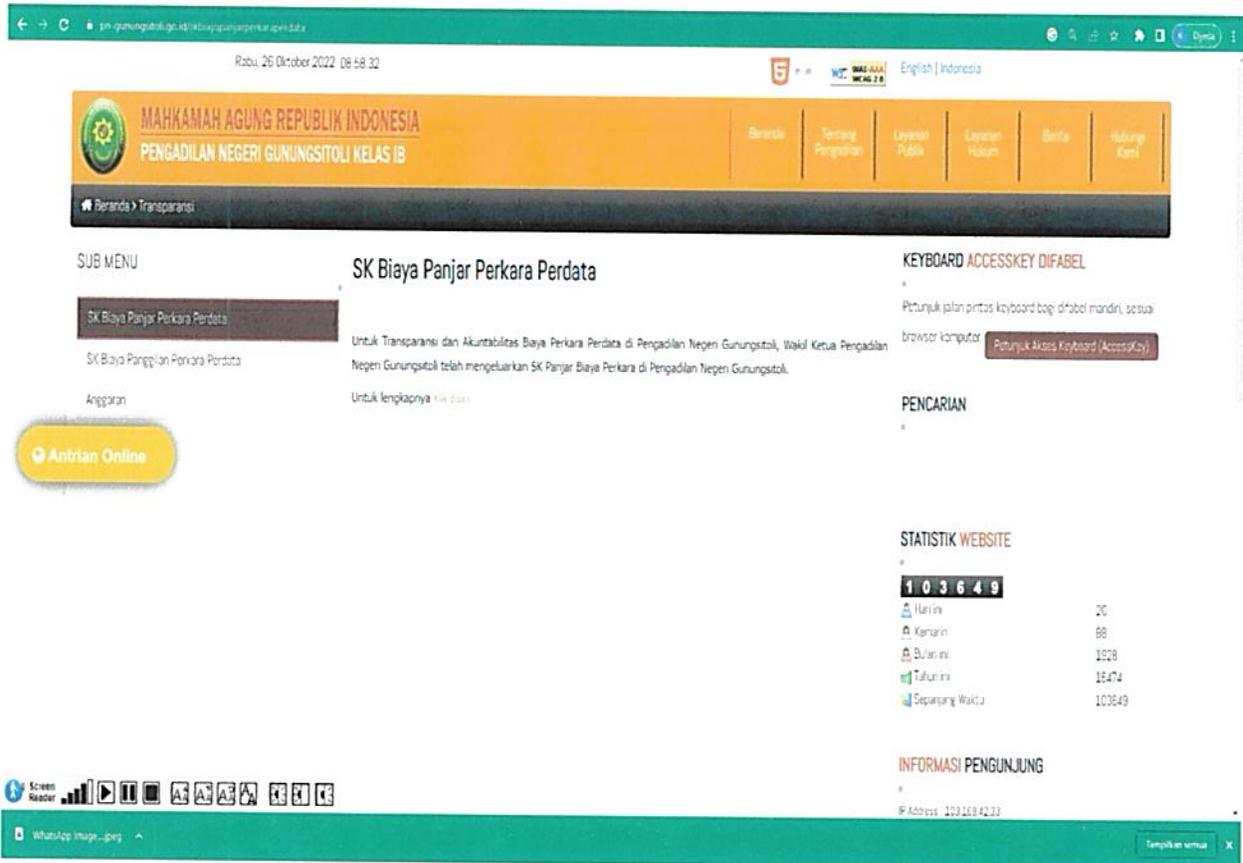
### EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH I MENJUAL PENGARUH

Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunungsitoli di ruang PTSP



## EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH II TRANSPARANSI BIAYA

### Memuat Biaya Panjar Perkara di Website



Robu, 26 Oktober 2022 08:58:32

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSTOLI KELAS IB

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami

Beranda > Transparansi

SUB MENU

SK Biaya Panjar Perkara Perdata

SK Biaya Panggihan Perkara Perdata

Anggaran

Antrian Online

SK Biaya Panjar Perkara Perdata

Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gunungstoli, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungstoli telah mengeluarkan SK Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Gunungstoli.

Untuk selengkapnya klik disini

KEYBOARD ACCESSKEY DIFABEL

Petunjuk jalan pintas keyboard bagi difabel mandiri, sesuai browser komputer

Petunjuk Akses Keyboard (AccessKey)

PENCARIAN

STATISTIK WEBSITE

103649

Hari ini	20
Kemarin	88
Bulan ini	1028
Tahun ini	16474
Sepanjang Waktu	103649

INFORMASI PENGUNJUNG

IP Address: 103.168.42.33



Mencantumkan biaya/tarif PNBP produk layanan di Website dan tempat yang mudah dilihat pengunjung

**LAMPIRAN  
EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH III  
PERCALOAN**

Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja



---

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE TRIWULAN I  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

**A. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM).
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

**C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

Adapun hasil tindak lanjut 3 Unsur terendah monitoring dan evaluasi survey persepsi anti korupsi (SPAK) antara lain:

1. Indikator Terendah I : Menjual Pengaruh

Tindak lanjut dari unsur ini adalah Memasang papan informasi komitmen bersama Pengadilan Negeri Gunungsitoli di ruang PTSP agar tidak ada penyalagunaan identitas

2. Indikator Terendah II: Transparansi Biaya

Mencantumkan biaya/tarif PNBP produk layanan di Website dan mengarahkan petugas PTSP untuk memberikan informasi biaya PNBP dengan baik dan benar

3. Indikator Terendah III: Percaloan

Tindak lanjut dari unsur ini adalah Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja

**D. Penutup**

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei persepsi anti korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Gunungsitoli, 23 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ✍



Wijawiyata, S.H.  
NIP. 197605222001121001